

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang ditetapkan. 3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. 4. Memiliki rekam jejak jabatan,integritas yang baik.		Kepala OPD.					

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	5. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun. 6. Sehat jasmani dan rohani.							

Pulau Punjung, Juni 2024

Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia


H. YUSRIAL SKM.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680324 199003 1 002

Tim Verifikasi			
 Inspektur Drs. Ardy Sumanto, CfrA Nip.196812201990091001	 Kepala BKD Asril, A.P.M.Si Nip.19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S.Sos.Mt Nip.196906091989021001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB Martin Efendi, S. Hut. MM Nip. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Kepegawaian Daerah
KODE PROGRAM	5.03.02
KEGIATAN	Pengembangan Kompetensi ASN
HASIL/OUTPUT	Bertambahnya jumlah pejabat eselon II perempuan
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah ASN yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan eselon II pada tahun 2023 adalah sebanyak 122 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 83 orang dan perempuan sebanyak 39 orang. ➤ Jumlah PNS yang menduduki Eselon II Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 sebanyak 26 orang terdiri dari 23 laki-laki dan 3 orang perempuan. ➤ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. ➤ Syarat JPT Pratama : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kualifikasi paling rendah Sarjana atau Diploma IV - Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang ditetapkan. - Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun. - Memiliki rekam jejak jabatan, integritas yang baik. - Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun. - Sehat jasmani dan rohani. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih kurangnya Pejabat perempuan yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Eselon II. ➤ Eselon II laki-laki lebih banyak dari pada eselon II perempuan ➤ Persentase : <ul style="list-style-type: none"> Laki-laki = 88,5 % Perempuan = 11,5 % ➤ Pentingnya komitmen bersama untuk memprioritaskan perempuan untuk menduduki jabatan Eselon II. <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kurangnya sosialisasi tentang pelaksanaan pengisian jabatan eselon II b) Masih rendahnya kompetensi ASN Perempuan c) Masih kurangnya data ASN perempuan yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan Eselon II. d) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender dalam pemangku jabatan eselon. e) Kurangnya pemahaman pengambil kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender f) Belum optimalnya koordinasi antara BKPSDM dan Kepala OPD. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya percaya diri dan minat PNS perempuan untuk menjabat Eselon II, karena dilakukan Uji Kompetensi - Kurangnya dukungan dari pihak keluarga seperti suami

RENCANA AKSI	Komponen	Penempatan ASN Sesuai Kompetensi	
		Tujuan	Menempatkan Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi
		Alokasi	168.361.000,-
		Anggaran	
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur: Pejabat struktural yang memahami manajemen pemerintahan		
	2. Indikator dan Target Kinerja : <ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya jumlah Pejabat Ess.II Perempuan Terseleksiya Pejabat Esselon II baik perempuan maupun yang laki-laki. Terlaksananya pelantikan pejabat Esselon dan Fungsional tertentu, Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS 		



Pinjung, Juni 2024

Kepala Badan Kependegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. YUSRIAL, SKM, MM

Pemula Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680324 199003 1 002

Tim Verifikasi			
Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
Desa Andy Sumanto, Cfra NIP. 196812201990091001	Asri, A.P.M.Sj NIP. 197502251995011001	Paryanto, S.Sos.MT NIP. 196906091989021001	Martin Efendi, S. HUT, MM NIP. 197909052008011018

FORM KAK/TOR

Program	Kepegawaian Daerah	
Sasaran Program	Pejabat Struktural	
Kegiatan	Pengembangan Kompetensi ASN	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Assesment Center	
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
	Gambaran Umum	Untuk Mengisi kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Seleksi Terbuka (Shelter) Asessment atau Uji Kompetensi untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Uji Kompetensi - Pelantikan Pejabat Struktural - Pelantikan Pejabat Fungsional - Pelantikan Sumpah Janji CPNS ke PNS
	Indikator Kinerja	Persentase Penempatan ASN Sesuai Kompetensi
	Batasan Kegiatan	Pejabat Administrator yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
Maksud dan Tujuan	Terdapatnya Pejabat JPT yang memiliki Kompetensi sesuai dengan keahliannya	
Cara Pelaksanaan	Pembentukan Tim Seleksi Terbuka JPT yang terdiri dari Pejabat Internal dan External	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Di luar Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana : PPTK sub Kegiatan Asessment Center Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM	
Jadwal	Januari s/d Desember 2025	
Biaya	168.361.000,-	

Pulu Punjung, Juni 2024
 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. YUSRIAL SKM.MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19680324 199003 1 002

GENDER BUDGET STATEMENT

INDIKATOR KINERJA UTAMA : CAPAIAN SASARAN RPJMD

SKPD : BAPPERIDA DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN : 2025


PROGRAM	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
KODE PROGRAM	5.01.02		
KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
HASIL/ OUTPUT	Dokumen perencanaan (RKPD) yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 86 Tahun 2017 tentang perencanaan partisipatif, bottom-up, top-down, teknokratik, politik - Musrenbang salah satu instrument untuk menjawab pendekatan bottom up - RKPD RKPD 2024 porsi terkait dengan isu gender masih minim di Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V - Jumlah peserta musrenbang dari 214 Orang, 3 orang dari forum anak, disabilitas -, laki-laki 138 orang atau 65 % perempuan 76 orang atau 35 % - Usulan masyarakat lebih banyak pada bidang fisik dan prasarana - Minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orang yang menghadiri sudah ditentukan (undangan tidak menjangkau semua komponen) - Keterlibatan mayoritas laki-laki pada musrenbang Musrenbang RKPD Kabupaten - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding peserta laki-laki, dan kualitas perwakilan perempuan relatif pasif dibandingkan peserta laki-laki sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan - Utusan Perwakilan dari kecamatan pada kegiatan musrenbang didominasi laki-laki dibanding perempuan, karena terkait petugas/pejabat wewenang nagari didominasi kaum laki-laki - Kemampuan masyarakat menentukan usulannya tergantung pada prioritas, keselarasan pembangunan daerah, provinsi - Porsi pengelolaan anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan topdown dan politik <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASN yang berperan sebagai fasilitator dan narasumber tidak memahami konsep responsif gender - Kesenjangan Gender dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting daripada perempuan - Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep Gender yang menganggap gender sebagai mendahulukan perempuan - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender - Budaya Patriaki yang mengutamakan Pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh masyarakat, ketua kelompok, dan lain-lain - Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan	
		Tujuan	Meningkatkan kualitas peserta musrenbang (khususnya) perempuan
		Alokasi Anggaran	Rp. 115,000,000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	Juknis yang responsif gender dalam proses musrenbang	
		Tujuan	Fasilitasi gender dalam musrenbang
		Alokasi Anggaran	Rp. 115,000,000,-
	Total Anggaran	Rp. 115,000,000,-	

Capaian Program	Out put : RKPD Kab. Dharmasraya Tahun 2025 yang responsif Gender Out come : Terakomodirnya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan
-----------------	---

Pulau Punjung, 25 Juni 2024

 KEPALA BAPPERIDA,
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 PARYANTO, S.Sos., MT.
 NIP. 19680609 198902 1 001

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD Asih, AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala BAPPERIDA Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19680609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Sasaran Program		Optimalisasi keterlibatan stakeholder dalam RKPD
Kegiatan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional
	Indikator Kinerja	Tertaksananya Musrenbang RKPD Kab. Dharmasraya
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Terakomodirnya hasil musrenbang dalam RKPD
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang utusan nagari, utusan kecamatan, stakeholker terkait untuk merumuskan usulan prioritas dalam musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, murenbang provinsi dan musrenbang nasional dalam waktu yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Penanggung Jawab : Kepala BAPPERIDA
Jadwal		Bulan Januari-Mei 2024
Biaya		Rp. 115.000.000,-

Pulau Punjung, 25 Juni 2024


KEPALA BAPPERIDA,
KABUPATEN DHARMASRAYA
PARYANTO, S.Sos., MT
 NRP. 19690609 198902 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SKPD : DINAS KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
KODE PROGRAM	1 02 02 2.02 0008
KEGIATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
HASIL/ OUTPUT	Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi laki-laki untuk melakukan cek kesehatan, pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan
ANALISA SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari kasus penyakit tidak menular yang terjadi akibat adanya peningkatan tekanan darah sistolik $\geq 140/90$ mmHg sehingga menyebabkan terjadinya angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) (Kemenkes RI, 2017)</p> <p>Data sasaran :</p> <p>Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun</p> <p>Total : 47.515</p> <p>Laki-laki : 24.865</p> <p>Perempuan : 22.650</p> <p>Mendapat pelayanan kesehatan</p> <p>Laki-laki : 8.801 (35,4%)</p> <p>Perempuan : 13.425 (59,3%)</p> <p>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses :</p> <p>Masih ada jarak tempuh dari rumah penderita hipertensi jauh ke faskes</p> <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kepedulian laki-laki terhadap kesehatan - Masih rendahnya kesadaran laki-laki untuk melakukan cek kesehatan pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan <p>Kontrol :</p> <p>Masih kurangnya media promosi kesehatan di media cetak maupun elektronik tentang bahaya penyakit hipertensi</p> <p>Manfaat :</p> <p>Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat posbindu PTM</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya promosi pelaksanaan kegiatan posbindu PTM pada masyarakat di wilayah setempat - Kurangnya edukasi kepada penderita hipertensi terhadap perubahan gaya hidup sehat - Kurangnya advokasi pada lintas sektor terhadap pelaksanaan posbindu PTM <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat siang hari laki-laki jarang di rumah karena berperan sebagai pemenuhan kebutuhan perekonomian keluarga - Kurangnya kepedulian keluarga terhadap bahaya penyakit hipertensi - Masih kurangnya komitmen lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam mendukung kegiatan program posbindu PTM di nagari dan jorong

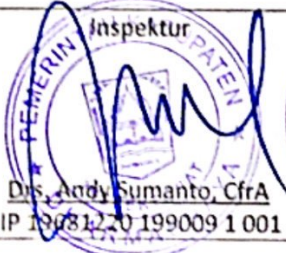

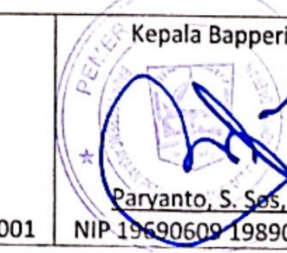
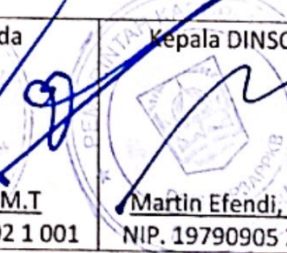
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengupayakan peran lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam Kegiatan posbindu PTM di setiap Nagari - Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat dan pelaksanaan posbindu PTM - Meningkatkan promosi kesehatan tentang bahaya penyakit hipertensi di medsos dan media cetak - Tingkatkan edukasi kepada keluarga dan penderita hipertensi khusus laki-laki tentang pola hidup sehat, bahaya penyakit hipertensi dan kepatuhan minum obat hipertensi pada saat kunjungan rumah penderita hipertensi - Tingkatkan kunjungan penderita hipertensi khususnya laki-laki dengan kegiatan posbindu PTM di masjid setelah sholat jum'at
		Alokasi Anggaran	Rp. 110.000.000,-
		Total Anggaran	Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.110.000.000,-
	Capaian Program	<p>Out put Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi laki-laki untuk melakukan cek kesehatan, pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan</p> <p>Out come Pengawasan Penderita hipertensi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menurunkan tingkat kematian yang di sebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM) hipertensi.</p>	

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya

Hj. Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM
NIP. 19690810 199102 2 001

Tim Verifikasi

 Inspektur <u>Drs. Andy Sumanto, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Ami, AP, M. Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida <u>Paryanto, S. Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB <u>Martin Efendi, S. Hut. M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	--	---

KERANGKA AJUAN KEGIATAN (KAK)

Trem Of Reference (TOR)

Program		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun
Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Latar Belakang	Dasar Hukum	1.Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM 2.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM (Standar Pelayanan Minimal)
	Gambaran Umum	Meningkatkan kunjungan penderita hipertensi
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan sosialisasi tentang manfaat dan pelaksanaan posbindu PTM- Meningkatkan promosi dan mengupayakan peran lintas sector dan tokoh masyarakat dalam Kegiatan posbindu PTM di setiap Nagari dan Jorong- Tingkatkan edukasi kepada keluarga dan penderita hypertensi khusus laki-laki tentang pola hidup sehat ,bahaya penyakit hipertensi dan kepatuhan minum obat hipertensi pada saat kunjungan rumah penderita hipertensi- Tingkatkan kunjungan penderita hipertensi khususnya laki-laki dengan kegiatan posbindu PTM di masjid setelah sholat jum'at
	Indikator Kinerja	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
	Batasan Kegiatan	Meningkatkan peran serta penderita hipertensi , laki-laki untuk melakukan cek kesehatan pengukuran tekanan darah satu kali sebulan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan kunjungan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Sosialisasi pelaksanaan kegiatan posbindu PTM, Promosi kesehatan, Advokasi
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Posbindu PTM di setiap Nagari di wilayah setempat
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Kabid.Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelola program PTM
Jadwal		Bulan Januari. s/d Desember 2025.
Biaya		Rp. 110.000.000,-

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya



Hj. Yosta Defina, S.Farm, Apt, M.KM

NIP. 19690810 199102 2 001

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SKPD : DINAS KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
KODE PROGRAM	1 02 02 2.02 0007
KEGIATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
HASIL/ OUTPUT	Meningkatnya kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan
ANALISA SITUASI	<p>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Meningkatkan derjat kesehatan lansia baik secara fisik maupun mental agar dimasa tua bahagia dan berdaya guna dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. hal tersebut upaya yang dilakukan adalah kegiatan promotif dan preventif yaitu cek kesehatan berkala melalui posyandu lansia, di Kabupaten Dharmasraya ada 197 posyandu lansia.</p> <p>Jumlah Sasaran</p> <p>Jumlah lansia sebanyak 68.241 orang terdiri dari Laki-laki 35.744 orang dan Perempuan 32.497 orang dibagi atas tiga kelompok yaitu :</p> <p>Pra-lansia 39.494 orang LK : 20.666 orang PR : 18.828 orang Lansia 21.239 orang LK : 11.069 orang PR : 10.170 orang Lansia Resti 7.508 orang LK : 4.009 orang PR : 3.499 orang</p> <p>Jumlah kunjungan lansia di tahun 2023 yaitu :</p> <p>Kunjungan Pra-lansia (45-59 Th) LK : 9.948 orang PR : 12.314 orang Lansia (60-69 Th) LK : 5.150 orang PR : 6.451 orang Lansia Resti > 70 Th LK : 2.909 orang PR : 3.002 orang</p> <p>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses : Masih ada jarak tempuh dari rumah lansia jauh ke posyandu lansia</p> <p>Partisipasi : Masih rendahnya kesadaran lansia laki-laki untuk melakukan cek kesehatan ke posyandu lansia</p> <p>Kontrol : Masih kurangnya komitmen lintas sektor terkait dan tokoh masyarakat dalam mendukung program kesehatan</p> <p>Manfaat : Kegiatan program monoton sehingga dapat menimbulkan kurang minat para kaum laki-laki untuk melakukan cek kesehatan karena pelayanan di posyandu hanya diperiksa pengukuran tensi saja dan cek gula darah tanpa diberi obat</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">• Menghindari kegiatan monoton perlu dilakukan kegiatan berinovasi untuk meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan

	<ul style="list-style-type: none"> •kurang memadainya sarana dan prasarana di lapangan sehingga pelayanan kesehatan di posyandu lansia belum maksimal •Masih kurangnya kerjasama dan advokasi pada lintas sektor terhadap pelaksanaan posyandu lansia <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> •Masih ada keluarga melibatkan lansia laki-laki ikut berperan sebagai pemenuhan ekonomi keluarga sehingga pada saat siang hari lansia laki-laki jarang di rumah •Masih rendahnya peran serta keluarga lansia laki-laki untuk membawa lansia ke posyandu lansia •Kuranganya keterlibatan tokoh masyarakat pada saat kegiatan posyandu lansia 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan advokasi pada lintas sector tentang pengadaan sarana dan prasarana di posyandu lansia di setiap jorong • Ciptakan inovasi yang menarik dalam melakukan kegiatan di posyandu lansia sehingga kunjungan lansia laki-laki meningkat • Menyesuaikan jadwal posyandu lansia dengan aktifitas lansia laki-laki • Memberikan motivasi pada keluarga lansia laki-laki agar berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu lansia
		Alokasi Anggaran	Rp. 100.000.000,-
		Total Anggaran	Tersedianya anggaran di Renja tahun 2025 sebanyak Rp.100.000.000,-
	<p>Capaian Program</p> <p>Out put Meningkatnya kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan</p> <p>Out come Meningkatnya derjat kesehatan lansia baik secara fisik maupun mental agar dimasa tua bahagia dan berdaya guna dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.</p>		

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

**Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya**



Hj. Yosta Deline, S.Farm, Apt, M.KM
NIP. 19690810 199102 2 001

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumananto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD Airil, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos, M.T NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSQSP3APPKB Martin Efendi, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	---	--

KERANGKA AJUAN KEGIATAN (KAK)

Trem Of Reference (TOR)

Program		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Pada Usia Lanjut
Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Sub Kegiatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM (Standar Pelayanan Minimal)
	Gambaran Umum	Meningkatkan kunjungan lansia untuk cek kesehatan
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan advokasi pada lintas sector tentang pengadaan sarana dan prasarana di posyandu lansia di setiap jorong• Ciptakan inovasi yang menarik dalam melakukan kegiatan di posyandu lansia sehingga kunjungan lansia laki-laki meningkat• Menyesuaikan jadwal posyandu lansia dengan aktifitas lansia laki-laki• Memberikan motivasi pada keluarga lansia laki-laki agar berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu lansia pada saat kunjungan rumah
	Indikator Kinerja	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
	Batasan Kegiatan	Meningkatkan kunjungan lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan kunjungan pelayanan kesehatan pada lansia laki-laki ke posyandu lansia untuk cek kesehatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Advokasi ke lintas sector, Berinovasi dalam melakukan kegiatan,
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Fasyankes dan Posyandu lansia di setiap Nagari di wilayah setempat
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Kabid.Kesehatan Masyarakat dan Pengelola lansia
Jadwal		Bulan Januari. s/d Desember 2025.
Biaya		Rp. 100.000.000,-

Pulau Punjung, 26 Juni 2024

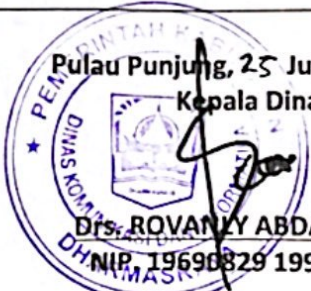
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Dharmasraya



Hj. Yosta Defina S.Farm, Apt, M.KM
NIP. 19690810 199102 2 001

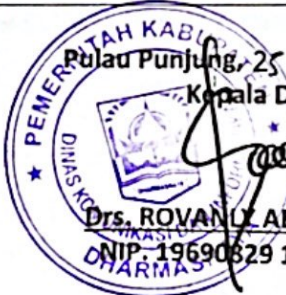
FORM KAK/TOR

Program	Informasi dan Komunikasi Publik	
Sasaran Program	Masyarakat	
Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Gambaran Umum	Untuk menyampaikan Informasi Pembangunan Kepada seluruh Masyarakat Dharmasraya, agar seluruh masyarakat memperoleh Informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada Nagari untuk pembentukan jaring-jaring informasi tingkat nagari - Pengadaan Informasi kegiatan pembangunan melalui media Baliho dan spanduk setiap Jorong.
	Indikator Kinerja	Jumlah Media Internal (Vidiotron, Majalah, kelender, baliho, spanduk) yang Informatif
	Batasan Kegiatan	Masyarakat Dharmasraya
Maksud dan Tujuan	Untuk menyampaikan Informasi Pembangunan Kepada seluruh Masyarakat Dharmasraya	
Cara Pelaksanaan	Membentuk jaring-jaring informasi Pembangunan di tingkat nagari	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana : PPTK sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Jadwal	Januari s/d Desember 2024	
Biaya	350.000.000,-	


 Pulau Punjung, 25 Juni 2024
 Kepala Dinas
Drs. ROVANY ABDAMS, M.Si
 NIP. 19690829 199009 1 001

FORM KAK/TOR

Program	Informasi dan Komunikasi Publik	
Sasaran Program	Wartawati	
Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Relasi Media	
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
	Gambaran Umum	Media Khusus Perempuan/anak yang mengajukan kerja sama sangat sedikit dan wartawati yang meliput pembangunan belum memahami gender
Kegiatan	Uraian Kegiatan	- Sosialisasi Gender kepada Media (kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APKB)
	Indikator Kinerja	Jumlah wartawati yang memahami Kesetaraan Gender
	Batasan Kegiatan	Wartawati
Maksud dan Tujuan	Untuk memberikan pemahaman kepada wartawati tentang kesetaraan gender	
Cara Pelaksanaan	Memberikan sosialisasi kepada wartawati tentang kesetaraan gender	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya	
Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan	Pelaksana : PPTK sub Kegiatan Relasi Media Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Jadwal	Januari s/d Desember 2024	
Biaya	475.797.813,-	


 Pulau Punjung, 25 Juni 2024
 Kepala Dinas
Drs. ROVANU ABDAMS, M.Si
 NIP. 19690629 199009 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

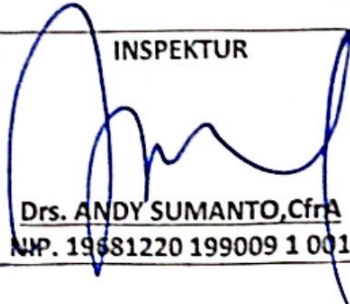


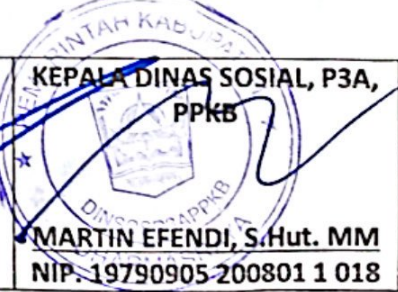
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Relasi Media
KODE PROGRAM	2.16.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Kegiatan ini merupakan peningkatan informasi public yang dilakukan secara eksternal melalui kerjasama media, yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i>. Keterbukaan informasi public ini juga menjadi target IKU dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diharapkan informasi pembangunan dapat diakses untuk seluruh masyarakat termasuk ibu, anak dan lansia.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media perempuan atau media khusus anak yang mengajukan kerjasama sangat sedikit, hanya 1 media (Narasi). <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartawati yang meliput kegiatan pembangunan yang memahami gender sangat kurang (+ 10 orang) <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada masalah (fasilitas yang sama diberikan untuk wartawati dan media khusus perempuan (Narasi)) <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan, anak dan lansia Dharmasraya tidak responsive terhadap Informasi perkembangan Pembangunan. <p>b. Penyebab Kesenjangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada sosialisasi kepada media untuk lebih banyak mengirimkan wartawan dalam peliputan kegiatan pembangunan yang memahami gender <p>c. Penyebab Kesenjangan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media khusus perempuan atau media khusus anak yang mengajukan kerjasama sangat sedikit, hanya 1 media (Narasi). - Jumlah wartawati (4 orang) yang meliput kegiatan pembangunan dan belum memahami gender
CAPAIAN PROGRAM	<p>d. Tolak Ukur</p> <p>Jumlah Dana Rp. 475.797.813,-</p> <p>e. Indikator dan Target Kinerja</p>

	<u>Input :</u> - Jumlah wartawan yang memahami kesetaraan gender bagi bapak, ibu, anak dan lansia <u>Output:</u> - Jumlah kerjasama media nasional dan local yang memberikan informasi kesetaraan gender <u>Outcome :</u> - Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	475.797.813,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tuju Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah) khusus untuk pelaksanaan kerjasama media dan proses kerja samanya	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Sosialisasi gender kepada media (kerjasama dengan Dinas Sosial, P3APPKB)
		Masukan Rp. 0,00,- (dana melalui Dinas Sos, P3A, PPKB)
		Keluaran Jumlah wartawan yang memahami gender
		Hasil Tersebarnya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat


Pulau Pinang, 25 Juni 2024
Kepala Dinas
Drs. ROVANY ABDAMS, M.Si
NIP. 19690829 199009 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN			
INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPERIDA	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB
 <u>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 <u>ASRIL AP., M.Si</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 <u>PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 <u>MARTIN EFENDI, S.Hut. MM</u> NIP. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)





SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Informasi dan Komunikasi Publik
KEGIATAN	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
KODE PROGRAM	2.16.02
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Keterbukaan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tuntutan perkembangan di era saat ini. Disahkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government</i> dan <i>Good Governance</i>. Keterbukaan informasi publik ini juga menjadi target IKU dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik diharapkan informasi pembangunan dapat diakses untuk seluruh masyarakat termasuk ibu, anak dan lansia.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses informasi untuk ibu, anak dan lansia yang lebih banyak di rumah masih terbatas <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya minat masyarakat terutama ibu, anak dan lansia untuk mengakses informasi <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kontrol untuk mengetahui fasilitas yang sama untuk pria, wanita, anak dan lansia <p>Manfaat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perempuan, anak dan lansia tidak responsive terhadap Informasi terutama dalam perkembangan Pembangunan. <p>b. Penyebab Kesenjangan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama ibu, anak, dan lansia mengenai pentingnya informasi publik tentang berbagai kegiatan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. <p>c. Penyebab Kesenjangan Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Keinginan Masyarakat Terutama Ibu, anak dan lansia untuk mengakses informasi publik.
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Jumlah Dana Rp. 750.000.000,-</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja</p> <p>Input :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media internal (vidiotron, majalah, kalender, baliho, spanduk) yang informative bagi bapak, ibu, anak

	dan lansia		
	Output: - Adanya penyampaian informasi pembangunan seluruh masyarakat Dharma Raya termasuk Ibu, anak, dan lansia		
	Outcome : - Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi pembangunan termasuk ibu, anak dan lansia		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Sosialisasi kepada Nagari untuk membentuk jaringan informasi pembangunan di tingkat Nagari	
		Masukan	Rp. 50.000.000,-
		Keluaran	Terlaksananya sosialisasi pembentukan jaringan informasi pembangunan kepada Nagari se-Kabupaten Dharma Raya
		Hasil	Tersebar nya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat
	Kegiatan 2	Pengadaan informasi kegiatan pembangunan melalui media baliho dan spanduk di setiap jorong	
		Masukan	Rp. 300.000.000,-
		Keluaran	Pemasangan spanduk kegiatan informasi pembangunan selama 1 tahun
		Hasil	Tersebar nya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat


 Puncung, 25 Juni 2024
 Kepala Dinas
 Drs. ROVANY ABDAMS, M.Si
 NIP. 19690629 199009 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN

 INSPEKTUR Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001	 KEPALA BKD ASRI AP., M.Si NIP. 19690603 198902 1 001	 KEPALA BAPPERIDA PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	---	--

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Perencanaan dan Pembangunan Industri
KEGIATAN	Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota
KODE KEGIATAN	3 31 02 2.01
HASIL / OUTPUT	Meningkatnya jumlah pelaku IKM yang laki – laki. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jumlah pelaku IKM lebih di dominasi oleh kaum perempuan. Maka dengan adanya kegiatan pelatihan ini dapat memberikan pencerahan bahwasanya laki – laki juga bias berperan sama halnya dengan perempuan dalam dunia usaha khususnya industri rumah tangga Jumlah IKM Seluruhnya : 2633 orang Jumlah IKM Perempuan : 1843 (70 %) Jumlah IKM Laki – Laki : 790 orang (30 %)</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses: Kurangnya informasi tentang persamaan kesempatan dalam berusaha Partisipasi: Kurangnya partisipasi laki – laki yang menjadi pelaku IKM Control: Kurangnya sosialisasi tentang persamaan kesempatan dalam berusaha Manfaat : Hilangnya kesenjangan dalam kesempatan berusaha</p> <p>b. Penyebab Internal Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang persamaan kesempatan dalam berusaha.</p> <p>c. Penyebab Eksternal 1. Pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa hanya perempuan yang cocok menjadi pelaku IKM 2. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah di kecamatan dan nagari</p>
RENCANA AKSI	<p>Komponen / Aktifitas 1 Melakukan sosialisasi tentang kesetaraan hak dalam berusaha. Tujuan : Menyampaikan tentang persamaan hak dalam menentukan usaha dan tidak ada perbedaan kesetaraan gender dalam hal tersebut.</p> <p>Komponen / Aktifitas 2. Mengadakan pelatihan bagi IKM dalam difersifikasi produk dan packaging dan Pengadaan leaflet, brosur yang menyampaikan persamaan kesempatan dalam berusaha. Tujuan : Melatih IKM dalam hal difersifikasi produk dan packaging.</p>
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. Tolak Ukur Jumlah Dana sebesar Rp. 350.000.000,00</p> <p>2. Indikator dan Target Kinerja <u>Input :</u> - Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 350.000.000,00</p>

	Output: - Hasilnya terciptanya para pelaku IKM muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat		
	Outcome : - Perekonomian masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi.		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 untuk Kegiatan Pelatihan disefikasi produk dan packaging	
		Masukan	Rp. 350.000.000,00
		Keluaran	Kegiatan Pelatihan disefikasi produk dan packaging
		Hasil	Terciptanya para pelaku IKM muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat.

Pulau-Pinang, 26 Juni 2024

Kepala Dinas,



NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT

Pembina Tekn / IVb

NIP. 19801115 200501 1 013

VERIFIKASI KEGIATAN

 Inspektur Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP.196812201990091001	 KEPALA BKD ASRIL, AP, M.Si NIP.19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida PARYANTO, S.Sos, M.T NIP.196906091989021001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut, MM NIP. 19790905 200801 1 018
--	--	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Sasaran Program		Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industry
Kegiatan		Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industry Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan		Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Perindustrian No 110/M.IND/Per/12/2015 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota 2. Perda Kabupaten Dharmasraya no.6 Th 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2019 – 2039
	Gambaran Umum	Kegiatan Pelatihan dan sosialisasi ini di peruntukkan bagi IKM yang berada dibawah binaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pelatihan dan sosialisasi ini direncanakan akan diikuti oleh 100 IKM
	Indikator Kinerja	Terlatihnya IKM dalam difersifikasi produk dan packaging
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melatih IKM laki – laki dan perempuan untuk peningkatan omzet dan meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang 100 IKM dan mendatangkan narasumber yang relevan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Hotel Jakarta Indah
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Bidang Perindustrian Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 350.000.000,-

Pulau Pinang, 26 Juni 2024

Kepala Dinas,

NOFRIADI RONI PUSKA, ST, MT
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 19801115 200501 1 013

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
KODE PROGRAM	2.11.03		
KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
HASIL/OUTPUT	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Kampung Iklim di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang akan diusulkan terdiri atas Kecamatan Tiung, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pulau Punjung. Kelompok Teknis Pelaksana Kampung Iklim di tingkat tapak yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang anggotanya terdiri atas 100% perempuan dengan berkoordinasi dengan perangkat nagari atau jorong di daerah yang bersangkutan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>a) Masih kurangnya responsif gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>b) Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>a) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender</p> <p>b) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>c) Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>b) Koordinasi lintas sektor yang masih belum optimal</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender	
		Tujuan	Untuk mengetahui pemahaman tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Pemberian Penghargaan terhadap Nagari yang telah menerapkan program kampung iklim	
		Tujuan	Memberikan motivasi ke Nagari lain untuk mengikuti kegiatan Program Kampung Iklim.

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
KODE PROGRAM	2.11.03		
KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
HASIL/OUTPUT	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Kampung Iklim di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 yang akan diusulkan terdiri atas Kecamatan Tiumang, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pulau Punjung. Kelompok Teknis Pelaksana Kampung Iklim di tingkat tapak yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT) yang anggotanya terdiri atas 100% perempuan dengan berkoordinasi dengan perangkat nagari atau jorong di daerah yang bersangkutan.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>a) Masih kurangnya responsif gender dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>b) Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>a) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender</p> <p>b) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>c) Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengarusutamaan Gender</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</p> <p>b) Koordinasi lintas sektor yang masih belum optimal</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Sosialisasi tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender	
		Tujuan	Untuk mengetahui pemahaman tentang Program Kampung Iklim yang responsive gender
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Pemberian Penghargaan terhadap Nagari yang telah menerapkan program kampung iklim	
		Tujuan	Memberikan motivasi ke Nagari lain untuk mengikuti kegiatan Program Kampung Iklim.

Capaian Program	<p>Out put Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan</p> <p>Out come Terbentuknya Kampung Iklim baru</p>
-----------------	---



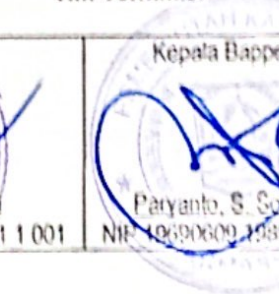

Sikabadi, 25 Juni 2024



(Budi Waluyo, S.PKP)

NIP. 19461030 198703 1 003

Tim Verifikasi



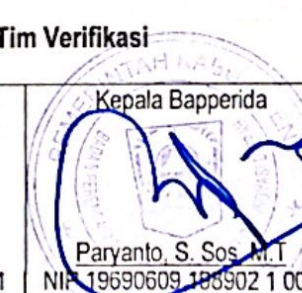

 Inspektur Drs. Adi Sumanto, CfrA NIP. 19631220 199009 1 001	 Kepala BND Asri AP, M. Si NIP. 19750228 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos., M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSPAPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Sasaran Program		Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
	Gambaran Umum	Kegiatan Program Kampung Iklim dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat di Nagari yang akan diusulkan menjadi kampung iklim
	Indikator Kinerja	Terbentuknya Kampung Iklim
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat tapak
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan Pengendalian Emisi, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan PulauPunjung.
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub KegiatanKoordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 69.166.400,-

Sikabau, 25 Juni 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KABUPATEN DHARMASRAYA
 (Budi Waluyo, S.PKP)
 NIP.196610301987031003

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumerito, CfrA NIP.196512201990091001	 Kepala BKD Asri, AP, M. Si NIP.197502251995011001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos. M. I NIP.196906091989021001	 Kepala DINSOC3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP.197909052008011018
---	---	---	--

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

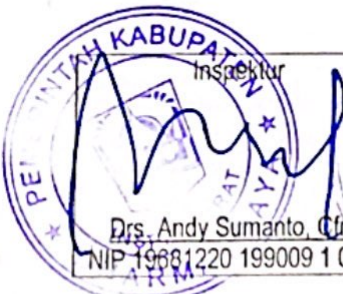

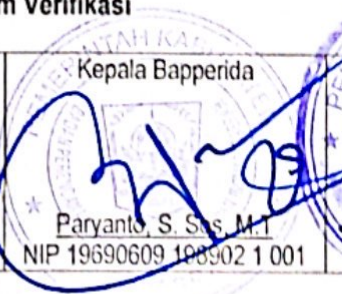

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025

Urusan :						
Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup				
Sub Unit Organisasi	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup				
Program	2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
Kegiatan	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
Sumber Pendanaan		APBD				
Lokasi Kegiatan		Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Pulau Punjung.				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2025				
Kelompok Sasaran		KWT				
Jumlah 2024		46.897.000,-				
Jumlah 2025		69.166.400,-				
Jumlah 2026						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja				
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	69.166.400,-				
Rincian Hitungan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					69.166.400,-
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA					69.166.400,-
5.1.02.01.01	BELANJA BARANG PAKAI HABIS					14.000.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					500.000
	spanduk	2	Paket	250.000	0	500.000.
5.1.02.01.01.00052	Belanja Natura dan Pakan Natura					4.500.000
	Nasi	150	Bungkus	22.000	0	3.300.000
	Snack	150	Kotak	8000	0	1.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Pembawa Acara dan Panitia					9.800.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1	Paket	9.500.000		9.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					35.866.400
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Paket	15.836.40 0		15.836.400
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Paket	17.030.00 0		20.030.000
Grand Total						69.166.400,-

Sikabatu, 25 Juni 2024
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
 KABUPATEN DHARMASRAYA**
 (Budi Waluyo, S.PKP)
 NIP. 19661030 198703 1 003

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Sumanto, CPA NIP. 19661220 199009 1 001	 Kepala BKD Asri, AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sas, M. I NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB MARTIN EFENDI, S. Hut, M. M NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SKPD/ INOVASI/ KESENJANGAN GENDER/
PENCAPAIAN SDG's/ PENCAPAIAN SPM/ SERVICE DELIVERY (Pilih Kategori yang
sesuai dengan program masing-masing OPD & Kecamatan)**

SKPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN



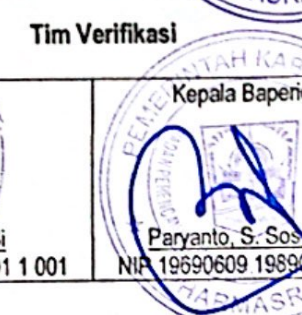

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
KODE PROGRAM	3.25.06		
KEGIATAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
HASIL/ OUTPUT	Jumlah Kelompok usaha budidaya ikan dan usaha pengolahan ikan yang berkembang		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsumsi ikan yang masih rendah jika dibandingkan dengan angka ideal yang dibutuhkan tubuh - Terbatasnya akses masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan ikan karena kurang tersedia dan harga yang cukup tinggi <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Masih kurang dan rendahnya konsumsi dan pemahaman masyarakat pentingnya mengkonsumsi ikan untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya sosialisasi tentang nilai protein yang terkandung pada ikan untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita - Rendahnya jumlah pelaku usaha pengolahan ikan konsumsi yang mengakibatkan anak balita kurang mengenal pentingnya mengkonsumsi ikan. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai protein yang terkandung pada ikan untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi yang baik untuk wanita hamil, ibu menyusui dan anak balita karna kondisi keuangan yang rendah - Kurangnya inovasi dalam pengelolaan ikan untuk di konsumsi 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sosialisasi kepada Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita - Meningkatkan jumlah usaha pengelola ikan konsumsi agar anak balita lebih semangat untuk mengkonsumsi ikan - Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat - Pengadaan media informasi untuk memudahkan masyarakat pengenalan tentang pentingnya mengkonsumsi ikan 	
		Tujuan	Meningkatkan ketersediaan ikan untuk masyarakat dan konsumsi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita
		Alokasi Anggaran	Rp 20.547.000,-
		Total Anggaran	Rp. 20.547.000,-

Capaian Program	Out put: - Jumlah usaha Pengelolaan ikan konsumsi - Jumlah Konsumsi Ikan Masyarakat Out come : - Meningkatnya Angka konsumsi Ikan
-----------------	---


 Sikabau, Juni 2024
KEPALA PANGAN DAN PERIKANAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA
RAMILUS, SP.M.SI
 NIP. 19670918 199203 1 004

Tim Verifikasi

 Inspektur <u>Drs. Andy Sumanito, CfrA</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Asril, AP, M. Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Baperida <u>Paryanto, S. Sos. M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB <u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
--	---	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Sasaran Program		Masyarakat, Ibu hamil, Ibu Menyusui dan Balita
Kegiatan		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024
	Gambaran Umum	Tersedianya Ikan Konsumsi, Usaha Pengolahan Ikan dan terfasilitasinya gemarikan dan forikan.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	-Mengembangkan kelompok usaha pengolahan ikan yang telah ada dan menumbuhkan usaha pengolahan ikan yang baru -Meningkatkan Konsumsi ikan yang masih rendah dibandingkan angka ideal yang dibutuhkan tubuh dengan cara mengadakan kegiatan Gemarikan dan Forikan
	Indikator Kinerja	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		-Meningkatkan Angka konsumsi Ikan -Meningkatkan Produksi Ikan Segar dan Ikan Olahan -Meningkatkan pendapatan usaha masyarakat pengolahan ikan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		-Melakukan Sosialisasi manfaat makan ikan dan pemberian makanan berbahan ikan kepada ibu hamil dan anak-anak -Melakukan monitoring pada pelaku usaha pengolahan ikan agar sesuai dengan prosedur.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Pangan dan Perikanan
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Kepala Bidang Perikanan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perikanan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 20.547.000

Sikabau, Juni 2024
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA



RAMILUS, SP,M.Si

NIP/19670918 199203 1 004

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN SKPD/ INOVASI/ KESENJANGAN GENDER/
PENCAPAIAN SDG's/ PENCAPAIAN SPM/ SERVICE DELIVERY (Pilih Kategori yang
sesuai dengan program masing-masing OPD & Kecamatan)**

SKPD : DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
KODE PROGRAM	2.09.04		
KEGIATAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
HASIL/ OUTPUT	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 11 Nagari dengan Jumlah 120 Balita Sasaran - Jumlah Ketersediaan Cadangan Pangan sebanyak 32,706 Ton - Dampak Inflasi Harga Pangan - Jumlah Lumbung Pangan yang ada di kabupaten didharmasraya sebanyak 6 unit - Jumlah petugas lapangan 61 orang, Laki-laki 42 dan Perempuan 19 Orang. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemenuhan gizi yang baik bagi anak, sehingga mengakibatkan masih tingginya angka stunting di masyarakat.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya sosialisasi tentang pemberian gizi yang baik pada anak balita - Masih kurangnya kepedulian ibu tentang anak lahir stunting - Masih rendahnya jumlah lumbung pangan yang sesuai standard - Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sector dan Pemuka masyarakat. - Masih kurangnya sarana informasi baik media cetak dan elektronik - Masih rendahnya kompetensi petugas lapangan <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi yang baik untuk balita - Kurangnya dukungan keluarga terhadap pemenuhan gizi yang baik untuk balita karna kondisi keuangan yang rendah - Kurangnya sosialisasi tenaga kesehatan tentang pencegahan stunting sejak dini. 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sosialisasi - Meningkatkan jumlah lumbung pangan yang sesuai standard - Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lintas sector dan pemuka masyarakat - Pengadaan media informasi - Meningkatkan kapasitas petugas lapangan 	
		Tujuan	Meningkatkan pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan.
		Alokasi Anggaran	Rp 169.999.300,-
		Total Anggaran	Rp. 169.999.300,-

Capaian Program	<p>Out put:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi sebanyak 120 orang - Pemberian bantuan untuk perbaikan lumbung pangan sebanyak 6 unit - Melaksanakan bimtek untuk petugas lapangan sebanyak 61 Orang. <p>Out come :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan angka stunting pada anak balita - Meningkatnya Ketersediaan Pangan
-----------------	---


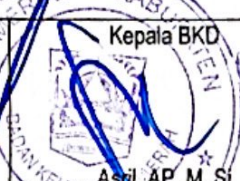
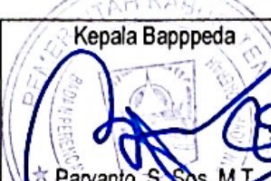

Sikabau, Juni 2024

KEPALA PANGAN DAN PERIKANAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA

RAMILUS, SP, M.Si

NIP. 19670918 199203 1 004

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p>Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>Asril, AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Paryanto, S. Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala DINSOSP3APPKB</p>  <p>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018</p>
--	--	--	---

FORM KAK/ TOR

Program		PENGOLAHAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Sasaran Program		Daerah Rentan Rawan Pangan dan Balita Stunting
Kegiatan		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kemandirian Pangan Daerah 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024
	Gambaran Umum	Tersedianya Bantuan untuk daerah rentan rawan pangan dan balita stunting.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	-Memberikan bantuan berupa makanan kepada daerah rentan rawan pangan dan balita stunting - Memberikan bantuan kepada Lumbung Pangan Masyarakat untuk memperbaiki produksi, agar cadangan pangan daerah tetap tersedia.
	Indikator Kinerja	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah.
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		- Meningkatkan pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan pangan.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		-Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian gizi kepada anak balita - Mendistribusikan bantuan makanan per 3 (tiga) bulan berturut-turut - Memberikan bantuan ke Lumbung Pangan Masyarakat berupa perbaikan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Pangan dan Perikanan
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 169.999.300

Sikabau, Juni 2024
KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN,
KABUPATEN DHARMASRAYA

RAMILUS, SP.M.Si
NIP.19670918 199203 1 004

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)
INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
DAN PENCAPAIAN SPM

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KODE PROGRAM	1.03.05
KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
HASIL/ OUTPUT	Terbangunnya Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan pembangunan yang respnsif gender 4 Lokasi
ANALISA SITUASI	<p>4. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang di selenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang</p> <p>SPM merupakan peranan yang penting dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat hya g memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan, bagi oemerintah daerah SPM dapat di jadikan dasar tolak ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan masyarakat, dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan Minimal - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang <p>Jenis pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya terdiri atas</p> <p>Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan</p> <p>Permasalahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur air Minum Perpipaan - Masih kurang kesadaran masyarakat tentang prilaku hidup sehat dan bersih - Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Air Minum perpipaan <p>5. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender Faktor Kesenjangan Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - terbatasnya informasi bagi masyarakat tentang pengelolaan dan Pemanfaatan jaringan perpipaan <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnyapeluang atau kesempatan bagi kelompok perempuan untuk penyampaian informasi untuk penentuan lokasi keterlibatan dalam pemeliharaan dan pengelolaan jaringan perpipaan <p>Kontrol :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnyapengetahuan di Masyarakat terutama di kelompok perempuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan perpipaan

	Manfaat : <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan penampung air pada kegiatan PengelolaanPengembanganSistemPenyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 	
	Penyebab Internal <ol style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah Jaringan perpipaan sesuai kebutuhan masyarakat Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak dalam pengelolaan jaringan perpipaan Koordinasi yang masih kurang Jumlah SDM yang belum memadai Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai Pembinaan dan Penyuluhan masih kurang optimal Masih kurangnya Media Informasi baik media cetak dan elektronik 	
	Penyebab Eksternal <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya Pemahaman dan kesadaran tentang manfaat jaringan perpipaan Kurangnya pengetahuan di Masyarakat terutama di kelompok perempuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan perpipaan 	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembangunan SPAL S Sambungan Rumah (SR) sebanyak 200 Rumah Tangga - Melakukan sosialisasi - Meningkatkan koordinasi - Menambah Jumlah SDM Sesuai kompetensi - Pengadaan sarana dan prasarana - Pengadaan sarana informasi media cetak dan elektronik
		Tujuan
		Alokasi Anggaran
		Rp. 2000.000.000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	
		Tujuan
		Alokasi Anggaran
	Total Anggaran	Rp. 2000.000.000,-
Capaian Program	Out put : Terbangunnya Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan pembangunan yang respnsif gender 4 Lokasi Out come : Tersedia nya akses air Minum aman dengan pembangunan yang responsif gender	









Sungai Dareh, Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN DHARMASRAYA



[Signature]
ANDAR ATMAJA, ST,MT
NIP. 19840329 201101 1011

Tim Verifikasi


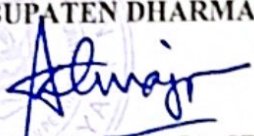
 Inspektur  <u>Drs. Andi Simanungkalit, S.H.</u> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD  <u>Asri AP, M.Si</u> NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida  <u>Paryanto, S.Sos, M.P</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala DINSOSP3APPKB  <u>MARTIN EFENDI, S.Hut, M.M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	--	---

FORM KAK/ TOR

Program		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Sasaran Program		Rumah Tangga berpenghasilan rendah
Kegiatan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 2. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan Minimal 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2018 tentang standar teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Gambaran Umum	<p>Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang di selenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang</p> <p>SPM merupakan peranan yang penting dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat hya g memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan, bagi oemerintah daerah SPM dapat di jadikan dasar tolok ukur dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan masyarakat, dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah</p>
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pembangunan Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan
	Indikator Kinerja	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
	Batasan Kegiatan	

Maksud dan Tujuan	Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Membuat Perencanaan, Melakukan Pembangunan Fisik dan Melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
Jadwal	Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya	Rp. 2000.000.000,-

Sungai Dareh, Juni 2024


**Plt. KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ANDAR ATMAJA, ST,MT
NIP. 19840329 201101 1011

GENDER BUDGET STATEMENT
Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota
(Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten Kota Yang Terbangun)

SKPD : Dinas Perhubungan

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
KODE PROGRAM	2.15.01	
KEGIATAN	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	
HASIL/ OUTPUT	Tersedianya 2 unit (pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu dan satu unit pelataran sarana dan prasarana parker angkutan barang dan penumpang)	
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Berdasarkan data dari BPS tahun 2019 jumlah populasi penduduk ada 5664 jiwa .2888 laki –laki dan 2776 perempuan. Nagari yang berada di kecamatan koto besar diantaranya: abai siat,bonjol,koto besar,koto gadang,koto laweh,koto ranah dan koto tinggi. Berdasarkan standar SRP (Satuan Ruang Parkir) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Adapun ruang parkir untuk masing –masing jenis kendaraan Menurut Standar Dir.Jend. Bina Marga adalah untuk bus/truk (3,40 x12,50 (m²) =42,5 m² ,mobil penumpang 2,50 m² x2,00 m²=12,5 m² dan sepeda motor 0.75x2,00(m²)=1,5m².</p>	
	<p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Sarana pelataran dan prasarana parkir terpadu belum memenuhi kebutuhan. ✚ Kurang nyamannya masyarakat dan Petugas Dishub yang berjaga di Koto Besar (Abai Siat) dalam parkir dan menunggu mobil penumpang dan barang. ✚ Belum diakomodinya kebutuhan pelataran dan sarana dan prasarana parkir terpadu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kecamatan Koto Besar. <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Belum terpenuhi nya tempat pelataran dan parkir yang responsif gender dan terpadu bagi masyarakat Koto Besar. ✚ Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat tempat parkir. ✚ Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor dan pemuka masyarakat. ✚ Masih belum tersedia tempat angkutan barang dan penumpang yang responsif gender. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembebasan lahan parkir. ✚ Masih rendahnya kesadaran masyarakat (petugas parkir) dalam mengatur ketertiban parkir. 	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktivitas 1	Melakukan pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir terpadu
		Tujuan Pembangunan pelataran dan sarana prasarana tempat parkir yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat
		Alokasi Anggaran
	Komponen/ Aktivitas 2	Melakukan pembangunan pelataran sarana dan prasarana parkir angkutan barang dan penumpang.
	Tujuan	Pembangunan pelataran dan sarana prasarana tempat parkir yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat

		Alokasi Anggaran	
	Total Anggaran	Rp 240.000.000,-	
Capaian Program	Out put Tersedianya 2 unit pembangunan pelataran parkir terpadu dan satu unit pelataran sarana dan prasarana paker angkutan barang dan penumpang. Out come Meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam paker dan menunggu mobil angkutan barang dan penumpang.		

Gunung Medan, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



CATUR EBYANDRI M, S.STP., M.Si.,
NIP. 197701211995111003

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapppperida	Kepala Dinas Sosial P3APKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP 196812201990091001	Asril AP, M. Si NIP 197502251995011001	Paryanto, S. Sos. M.T NIP 196906091989021001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 197909052008011018

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Sasaran Program		Terlaksananya pembangunan parkir yang responsive gender untuk masyarakat dan petugas dishub.
Kegiatan		Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota
Sub Kegiatan		Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten kota yang terbangun
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
	Gambaran Umum	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota belum bias terlaksana sampai tahun ini 2024
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Adanya pembangunan dan pelataran parkir terpadu
	Indikator Kinerja	Terbentuknya pembangunan dan pelataran parkir yang terpadu
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan pengadaan untuk pembangunan pelataran parkir terpadu
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan pelataran parkir terpadu
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Abai siat dan sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp.240.000.000,-

Gunung Medan, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

CATUR EBYANDRIM, S.STP.,M.Si.,
NIP.197701011995111003

Tim Verifikasi

 Inspektur Dr. Andy Sumarto, S.TA NIP.196812201990091001	 Kepala BKD Asri, AP, M. Si NIP.197502251995011001	 Kepala Bappperida Paryanto, S. Sos. M.T NIP.196906091989021001	 Kepala Dinas Sosial P3APPKB MARTIN ERENDI, S. Hut. M. M NIP.197909052008011018
---	---	--	--

GENDER BUDGET STATEMENT

Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota (Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten Kota Yang Terbangun)

SKPD : Dinas Perhubungan

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota		
KODE PROGRAM	2.15.01.2.07.11		
KEGIATAN	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
HASIL/ OUTPUT	Tersedianya 4 toilet yg responsife gender.		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Berdasarkan jumlah ASN 27 orang,CPNS 4 Orang, Honda 3 orang dan THL 173 Maka belum tercukupi untuk ke toilet dengan jumlah orang yang 207 orang dengan 2 toilet yang belum responsif gender. Satu unit dalam keadaan rusak berat dan satu unit dalam keadaan rusak sedang.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none">o sarana toilet yg belum memenuhi kebutuhan.o Jarak antara toilet dengan kantor cukup jauho Belum diakomodinya kebutuhan toilet sesuai dengan jumlah ASN,CPNS,Honda dan THLo kurang nyamannya ASN,CPNS, Honda danTHL dalam penggunaan toilet.		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	Tersedianya toilet yang responsif gender.
		Alokasi Anggaran	Rp.200.000.000,-
	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
Total Anggaran	Rp.200.000.000,-		
Capaian Program	Out put: Tersedianya 4 toilet yg responsife gender. Out come : Meningkatkan kenyamanan ASN,CPNS, Honda danTHL dalam penggunaan toilet yang responsive gender.		





Gunung Medan, Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

CATUR EBYANDRI M, S.STP.,M.Si.,
NIP.19770121 199511 1 003



Tim Verifikasi

 Aspekta <u>DjAndy Sulianto, Citra</u> NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>Asri, AP. M. Si</u> NIP 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappperida <u>Parwanto, S. Sos. M.T</u> NIP 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial BAPPKB <u>MARTIN EFFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP 19790905 200801 1 018
--	--	--	---

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Kegiatan		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Sub Kegiatan		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Latar Belakang	Dasar Hukum	PP No 16 Tahun 2021 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016 Peraturan pemerintah No 27 Tahun 2014
	Gambaran Umum	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya belum terealisasi tahun 2024
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
	Indikator Kinerja	Terbentuknya toilet yang responsive gender
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan kegiatan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp.200.000.000,-

Gunung Medan, Juni 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA



CATUR EBYANDRI M, S.STP.,M.Si.
NIP.19770121-199511-1-003

Tim Verifikasi

 Kepala BKD Asril, AP, M. Si NIP 19750225/199501 1 001		 Kepala Bappperida Paryanto, S. Sos. M.T NIP.19690609-198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3APKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	---	---

GENDER BUDGET STATEMENT

**Persentase Capaian Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota
(Jumlah Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten Kota Yang Terbangun)**

SKPD : Dinas Perhubungan

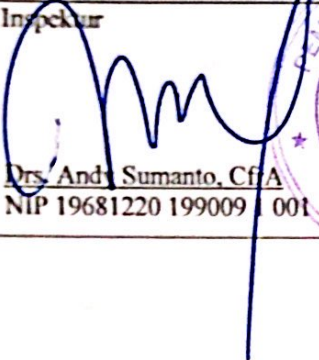

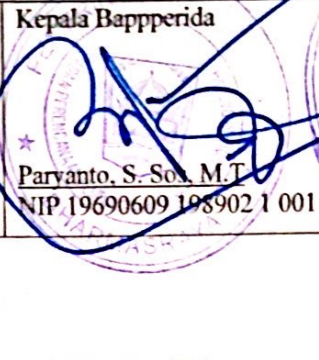

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
KODE PROGRAM	2.15.02.2.03		
KEGIATAN	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		
HASIL/ OUTPUT	Belum optimal nya penyelenggaraan terminal angkutan umum di pulau punjung dari 2018 sampai 2024. Itu semua karena sarana prasarana yang belum lengkap.		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Kabupaten Dharmasraya semenjak Tahun 2018 sampai saat ini 2024 Jumlah terminal yang dikelola hanya 1 unit terminal. Untuk lokasi hanya berada di pasar pulau punjung kecamatan pulau punjung. Jenis pelayanan yang dilakukan pada terminal mengatur sirkulasi penumpang angkutan umum. Menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan terminal. Berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang hanya membagi berdasarkan kewenangan pengelolaan terminal menjadi tipe A,B dan C. terminal sendiri merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan , menaikkan atau menurunkan orang/ barang serta perpindahan mode angkutan.Fungsi pelayanannya, terminal penumpang diklasifikasikan kedalam tiga tipe terminal (PP RI No.43 tahun 1993) yaitu Terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peluang akses dalam menggunakan sarana prasarana didalam terminal tidak memadai. Sarana terminal tidak lengkap. • Tidak adanya angkutan umum (angkot) • Belum memiliki tempat duduk ruang tunggu penumpang. • Tempat ibu menyusui tidak ada. Partisipasi gender L/P tugas pekerjaan lapangan kebanyakan laki –laki. Operator kendaraan angkutan umum didominasi laki-laki. • Pejabat yang melakukan pengawas terhadap kegiatan pengelolaan terminal angkutan umum didominasi laki-laki. 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	Terbentuknya terminal tipe c yang responsive gender
		Alokasi Anggaran	-
	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Total Anggaran	Rp -	
Capaian Program	<p>Out put: belum optimal nya penyelenggaraan terminal angkutan umum di pulau punjung dari 2018 sampai 2024. Itu semua karena sarana prasarana yang belum lengkap.</p> <p>Out come: Terciptanya transportasi transportasi angkutan umum yang selamat, aman lancar dan terkendali untuk semua jenis kendaraan yang beroperasi di terminal.</p> <p>Pengguna terminal setara gender baik laki-laki maupun perempuan.</p>		

Gunung Medan, Juni 2024



Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala Dinas Sosial PEAPKB
			
<u>Drs. Andy Sumanto, Cf. A.</u> NIP 19681220 199009 1 001	<u>Asri, AP, M. Si</u> NIP 19750225 199501 1 001	<u>Paryanto, S. Sos. M.T.</u> NIP 19690609 198902 1 001	<u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP 19790903 200801 1 018

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Sasaran Program		Terlaksananya terminal tipe c yang responsive gender
Kegiatan		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Sub Kegiatan		Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Latar Belakang	Dasar Hukum	Perda No 6 Tahun 2013 UU No 23 Tahun 2014
	Gambaran Umum	Pengadaan terminal tipe c yang responsive gender
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
	Indikator Kinerja	Jumlah rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Adanya terminal tipe c yang responsive gender
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang responsive gender
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Pasar Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		-

Gunung Medan, Juni 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



CATUR EBYANDRI M, S.STP.,M.Si.,
NIP.19770121 199511 1 003

Tim Verifikasi

Inspektur		Kepala BKD	Kepala Rapperida	Kepala Dinas Sosial P3APKB
Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP 19681220 199009 1 001		Asril, AP, M. Si NIP 19750225 199501 1 001	Paryanto, S. Sos, M.I NIP 19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19790905 200801 1 018

GENDER BUDGET STATEMENT

(Pernyataan Anggaran Gender)

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

SKPD : Dinas Pertanian

TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
KODE PROGRAM	3.27.02
KEGIATAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
HASIL/ OUTPUT	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>Data tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah kelompok tani di Kabupaten Dharmasraya yaitu 1.516 unit- Jumlah kelompok wanita tani yaitu 289 unit <p>- Komoditi yang dikelola kelompok tani yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p> <p>- Komoditi yang dikelola kelompok wanita tani yaitu tanaman pekarangan rumah</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Akses</u> Kaum perempuan kurang mendapat akses yang sama dari kaum laki-laki dalam sector pertanian- <u>Partisipasi</u> Sebagian besar penduduk yang bekerja di bidang pertanian berjenis kelamin laki-laki- <u>Kontrol</u> Kontrol terhadap pelaksanaan pertanian masih didominasi kaum laki-laki- <u>Manfaat</u> Kaum perempuan kurang mendapat manfaat dari pengembangan pertanian <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">- Kurang tersedianya kegiatan pertanian yang kondusif untuk kaum perempuan- Terbatasnya bantuan sarana dan prasarana <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">- Stigma masyarakat bahwa pelaku usaha bidang pertanian dominan laki-laki- Stigma masyarakat tenaga kaum laki-laki lebih kuat dari kaum perempuan- Perempuan kurang diberdayakan dalam kegiatan pertanian

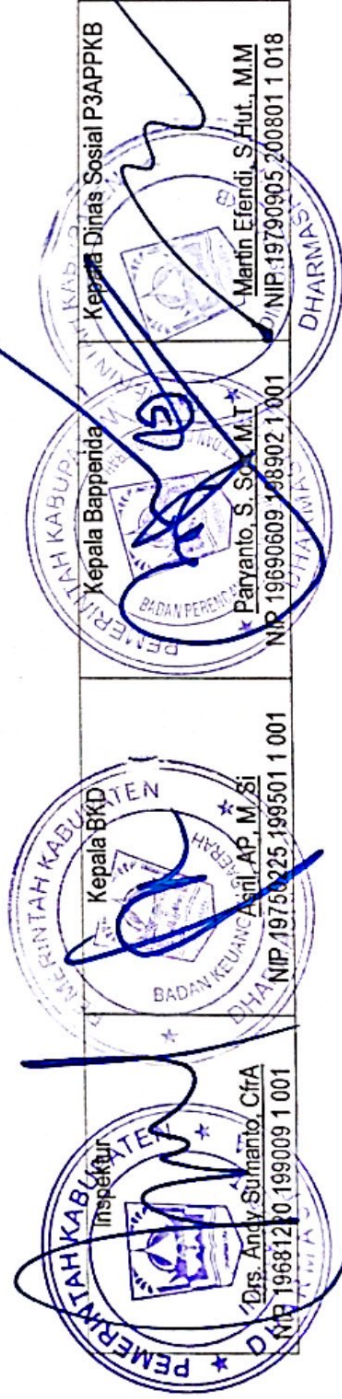
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Penyediaan bibit atau benih tanaman untuk penunjang pemberdayaan kelompok wanita tani serta melakukan pembinaan untuk pengembangan kelompok tani dan kelompok wanita tani	
	Tujuan	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peran KWT dalam meningkatkan ekonomi keluarga	
	Alokasi Anggaran	Rp. 125.000.000,-	
Total Anggaran		Rp. 125.000.000,-	
Capaian Program	Out put	Pengadaan benih dan bibit tanaman hortikultura serta sarana pendukungnya serta pembinaan untuk pengembangan KWT di Kab. Dharmasraya	
	Out come	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman hortikultura serta pemberdayaan kelompok wanita tani dalam sector pertanian	

Pada: Pujung, 20 Juni 2024

KEPADA DINAS P3APPKB,
KABUPATEN DHARMASRAYA

DARISMAN, S.Si., M.M.
NIP. 19750217 200003 1 001

Tim Verifikasi



FORM KAK/ TOR

Program		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Sasaran Program		Petani
Kegiatan		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan No. 83/KPTS/RC.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari Tahun 2021 Undang-undang No. 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian
	Gambaran Umum	Di Kabupaten Dharmasraya terdapat 1.516 unit kelompok tani dan diantaranya sebanyak 289 unit merupakan kelompok wanita tani. Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelompok wanita tani dapat dilakukan dengan penyediaan benih/bibit tanaman yang sesuai untuk KWT dan pemanfaat pekarangan seperti benih/bibit komoditas tanaman hortikultura.
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Penyediaan bibit atau benih tanaman serta sarana prasarana untuk penunjang pemberdayaan kelompok wanita tani serta melakukan pembinaan untuk pengembangan kelompok tani dan kelompok wanita tani
	Indikator Kinerja	Jumlah bibit/benih tanaman hortikultura yang diserahkan dan terlaksananya pembinaan terhadap kelompok wanita tani
	Batasan Kegiatan	Penyerahan bantuan benih/bibit, Bimbingan Teknis.
Maksud dan Tujuan		Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Melalui penyerahan bantuan bibit/benih tanaman hortikultura serta bimbingan teknis terhadap kelompok wanita tani
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan Penanggung jawab kegiatan		Bidang Hortikultura Dinas Pertanian
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 125.000.000,-

Pulau Punjung, 20 Juni 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**



FORMAT GBS (2)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

SKPD	: KECAMATAN KOTO BARU		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
KODE PROGRAM	7.01.02		
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
HASIL/OUTPUT	(Diambil dari GAP langkah 6)		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <p>a. Adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</p> <p>b. Jumlah layanan Paten Tahun 2023 Non Disabilitas 753 orang, Yang Disabilitas tidak ada</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara</p> <p>b. Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus</p> <p>c. Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas</p> <p>d. Disiapkan loket khusus disabilitas</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas	
	Alokasi Anggaran	Rp. 55.000.000,-	
	Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas	
	Alokasi Anggaran	Rp.1.500.000,-	
	Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector	
	Alokasi Anggaran	Rp. .1.000.000,-	
	Total anggaran	Rp. 57.500.000,-	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender		



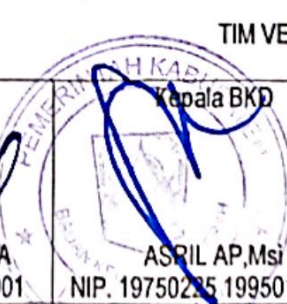

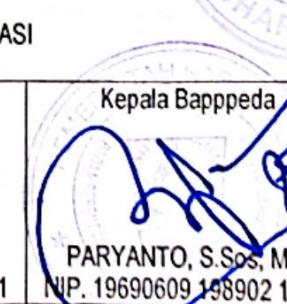
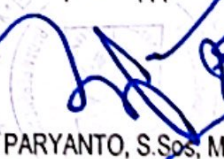


Koto Besar, 25 Juni 2024

Camat Koto Baru



DARMENDRA, S.Sos
NIP. 19791108 200901 1 004

TIM VERIFIKASI

 Inspektur  Drs. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 19681220 1990909 1 001	 Kepala BKD  ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappeda  PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB  MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
---	---	--	--


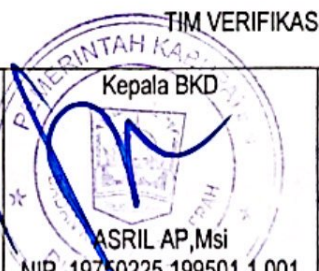

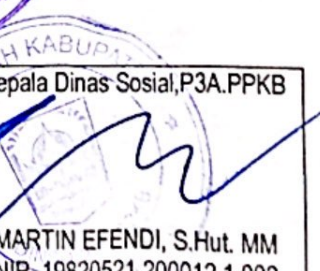
FORMAT GBS (2)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

SKPD	: KECAMATAN KOTO BESAR		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
KODE PROGRAM	7.01.02		
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
HASIL/OUTPUT	(Diambil dari GAP langkah 6)		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Jumlah layanan Paten Tahun 2023 Non Disabilitas 528 orang, Yang Disabilitas tidak ada c. Jumlah Data Disabilitas diKecamatan Koto Besar sebanyak 31 Orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara b. Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus c. Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas d. Disiapkan loket khusus disabilitas 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktivitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas	
	Alokasi Anggaran	Rp. 53.000.000,-	
	Komponen/ aktivitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas	
	Alokasi Anggaran	Rp.1.120.000,-	
	Komponen/ aktivitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector	
	Alokasi Anggaran	Rp. .750.000,-	
	Total anggaran	Rp. 54.870.000,-	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender		

Koto Besar, 19 Juni 2024
Camat Koto Besar

FAUZI ARIES.SH
NIP. 19850419 201001 1 010

TIM VERIFIKASI			
 Inspektur Dis. ANDI SUMANTO, CfrA NIP. 1968 1220 19900909 1 001	 Kepala BKD ASRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappeda PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002

FORMAT GBS(2) PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Mengatasi Kesenjangan Gender																																	
SKPD	: KECAMATAN PADANG LAWEH																																
TAHUN ANGGARAN	: 2025																																
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																																
KODE PROGRAM	7.01.02																																
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																																
HASIL/OUTPUT	Terpenuhinya layananan untuk penyandang Disabilitas																																
ANALISIS SITUASI	1. Gender Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). a. Adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Jumlah Layanan Paten 2023 , Non Disabilitas 205 org, Disabilitas 6 orang c. Jumlah Data Disabilitas dikecamatan Padang Laweh, sebanyak 20 orang 2. Isu dan Faktor Kesenjangan a. Belum adanya akses jalan yang nyaman untuk disabilitas b. Belum tersedianya kursi roda																																
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Menyediakan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp.2.000.000,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ aktifitas 2</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Menambah jalur khusus untuk disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp.3.500.000,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ aktifitas 3</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp.500.000,-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ aktifitas 4</td> <td colspan="2">(Diambil dari GAP langkah 7)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td>Rp.2.000.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total anggaran</td> <td>Rp.8.000.000,-</td> </tr> </table>		Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Menyediakan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas	Alokasi Anggaran	Rp.2.000.000,-	Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Menambah jalur khusus untuk disabilitas	Alokasi Anggaran	Rp.3.500.000,-	Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector	Alokasi Anggaran	Rp.500.000,-	Komponen/ aktifitas 4	(Diambil dari GAP langkah 7)		Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas	Alokasi Anggaran	Rp.2.000.000,-	Total anggaran		Rp.8.000.000,-
Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)																																
	Tujuan	Menyediakan Kursi Roda untuk penyandang disabilitas																															
	Alokasi Anggaran	Rp.2.000.000,-																															
Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)																																
	Tujuan	Menambah jalur khusus untuk disabilitas																															
	Alokasi Anggaran	Rp.3.500.000,-																															
Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)																																
	Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector																															
	Alokasi Anggaran	Rp.500.000,-																															
Komponen/ aktifitas 4	(Diambil dari GAP langkah 7)																																
	Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas																															
	Alokasi Anggaran	Rp.2.000.000,-																															
Total anggaran		Rp.8.000.000,-																															
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender																																

Padang Laweh, 26 Juni 2024

Plt. Camat Padang Laweh

Yohan Sarori, S.STP

NIP. 19930421 201609 1 001

Kepala Bapperida

Kepala Dinas Sosial, P3A,

PAKB

PARYANTO, S.Sos, MT

MARTIN EFENDI, S.Hut. MM

NIP. 19690609 198902 1 001

NIP. 19790905 200801 1018

Inspektur

Kepala BKD

Drs. ANDI SUMANTO, CfrA

ASRI AP, M.Si

NIP. 1968 1220 1990909 1 001

NIP. 19750225 199501 1 001

FORM KAK/ TOR

Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran Program		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan
Latar Belakang	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
	Gambaran Umum	Kebutuhan Sarana Prasarana Layanan Disabilitas
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Adanya Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
	Indikator Kinerja	Jumlah layanan Non perizinan yang dikeluarkan
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Meningkatkan Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Pengadaan Langsung
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Padang Laweh
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Non Perizinan Penanggung Jawab : Camat Padang Laweh
Jadwal		Bulan April 2025
Biaya		Rp. 8.000.000,-



Padang Laweh, 26 Juni 2024

Plt. Camat Padang Laweh.

YOHAN SARORI, S.STP
NIP. 19930421 201609 1 001

FORMAT GBS (1)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Mengatasi Kesenjangan Gender			
SKPD	: KECAMATAN PADANG LAWEH		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		
PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
KODE PROGRAM	7.01.03		
KEGIATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
HASIL/OUTPUT	Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RPKD Tahun Anggaran 2025 yang responsif		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender). Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang b. Tahun 2023 dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 24 Orang peserta perempuan , dan 6 orang peserta dari forum anak c. Tahun 2024 dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 2 Orang peserta perempuan <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang b. belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang c. Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Mengumpulkan dan merekap DURKP Nagari
		Alokasi Anggaran	Rp. 1.075.000
	Komponen/ Aktifitas 2	Tujuan	Distribusi undangan ke nagari
		Alokasi Anggaran	Rp. 500.000
	Komponen/ Aktifitas 3	Tujuan	Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar
		Alokasi Anggaran	8.400.000,-
	Total Anggaran		Rp.9.975.000
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RPKD Yang Responsif Gender		

Padang Laweh, 26 Juni 2024

Plt. Camat Padang Laweh,

Yohan Sarori, S.STP

NIP. 19930421 201609 1 001

Kepala Bapperida

Kepala Dinas Sosial, P3A,
P3KB

PARYANTO, S.Sos, MT

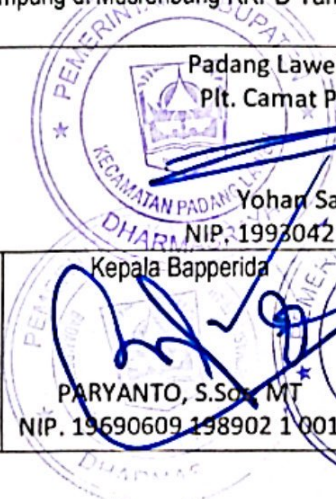
MARTIN EFENDI, S.Hut. MM

Drs. ANDI SUMANTO, Cfr

ASRIL AP, MSI

NIP. 19690609 198902 1 001

NIP. 19790905 2008011018



FORM KAK/ TOR

Program		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Sasaran Program		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kegiatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa
Latar Belakang	Dasar Hukum	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 000.7.2/34/Bappedda tanggal 16 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
	Gambaran Umum	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang
	Indikator Kinerja	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Merumuskan Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Mengundang utusan nagari dan stakeholker terkait untuk merumuskan usulan prioritas musrenbang kecamatan dalam satu ruang dan waktu yang telah ditentukan.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kecamatan Padang Laweh
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Di Desa Penanggung Jawab : Camat Padang Laweh
Jadwal		Bulan Februari 2025
Biaya		Rp. 9.975.000,-


Padang Laweh, 26 Juni 2024
Pt. Camat Padang Laweh,
YOHAN SARORI, S.STP
NIP. 19930421 201609 1 001

**GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**




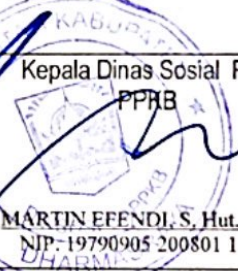
SKPD : RSUD Sungai Dareh				
TAHUN ANGGARAN : 2025				
PROGRAM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat			
KODE PROGRAM	1.02.02			
KEGIATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP			
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <p>a. Salah satu indikator penilaian Akreditasi rumah sakit adalah indikator keselamatan pasien, yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keselamatan pasien.</p> <p>b. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana</p> <p>c. Jumlah kunjungan pasien rawat inap : Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Dengan belum tersedianya sarana berupa WC duduk untuk pasien rawat inap untuk pasien disabilitas, lansi, ibu hamil dan ibu melahirkan akan menimbulkan kesenjangan dilihat dari aspek berikut : Akses : Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana Manfaat : Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselamatan pasien di ruang rawat inap.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>c. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung</p> <p>d. Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien disabilitas, lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan</p> <p>e. Penyebab Eksternal</p> <p>f. Konsultan perencanaan belum memahami pembangunan gedung berbasis gender</p> <p>g. Masyarakat belum memahami konsep gender</p>			
RENCANA AKSI	<table><tr><td>Komponen/ Aktifitas 1</td><td>Tujuan</td><td>pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap</td></tr></table>	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap
Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap		

	Alokasi Anggaran		Rp.125.000.000,-
	Komponen/ aktifitas 2	Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		Rp. 125.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output :</p> <p>Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi, Rawat Inap Syaraf dan Rawat Inap VIP</p> <p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh</p>		

Punjung, 20 Juni 2024
Direktur RSUD Sungai Dareh

Sarti Novita, S.Si, APT M. KM
NIP. 19771117 200501 2 008

Tim Verifikasi

 Inspektur <u>Drs. Andy Samanto, CFA</u> NIP. 19651220 199009 1 001	 Kepala BKD <u>ASRIL AP, M.Si</u> NIP. 19750225 199501 100	 Kepala Bappperida <u>Paryanto, S.Si, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPRB <u>MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M</u> NIP. 19790905 200801 1 018
---	--	---	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terintegrasi
Kegiatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
LatarBelakang	DasarHukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
	GambaranUmum	Subkegiatan operasional pelayanan rumah sakit dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Gedung RS dilaksanakan setiap tahunnya.
Kegiatan	UraianKegiatan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap
	IndikatorKinerja	Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh
	BatasanKegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat perencanaan kegiatan dan pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		RSUD Sungai Dareh.
Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan		Pelaksana : PPTK pekerjaan pemeliharaan rutin rumah sakit. Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sungai Dareh
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 125.000.0000,-

Pujung, 20 Juni 2024
 Direktur RSUD Sungai Dareh


 Sarti Novita, S.Si, APT M. KM
 NIP. 19771117 200501 2 008

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025

Urusan :						
Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Sub Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Program	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
Kegiatan	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan	1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit				
Sumber Pendanaan		BLUD				
Lokasi Kegiatan		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh				
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2025				
Kelompok Sasaran						
Jumlah 2022		Rp. 125.000.0000,-				
Jumlah 2023						
Jumlah 2024						
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah

Punjung, 20 Juni 2024

Direktur RSUD Sungai Dareh


Sarti Novita, S Si, APT M. KM
 NIP. 19771117 200501 2 008

**GENDER BUDGET STATEMENT
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)**

SKPD : RSUD Sungai Dareh		
TAHUN ANGGARAN : 2025		
PROGRAM	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	
KODE PROGRAM	1.02.02	
KEGIATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP	
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <p>a. Salah satu indikator penilaian Akreditasi rumah sakit adalah indikator keselamatan pasien, yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keselamatan pasien.</p> <p>b. Pemeliharaan rutin gedung RS merupakan pemeliharaan terhadap gedung RS untuk peningkatan pelayanan kepada pasien yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana</p> <p>c. Jumlah kunjungan pasien rawat Inap : Tahun 2021 laki-laki 2.922 dan perempuan 3.765 Tahun 2022 laki-laki 4.392 dan perempuan 4.758 Tahun 2023 laki-laki 4.199 dan perempuan 5168</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan Dengan belum tersedianya sarana berupa WC duduk untuk pasien rawat inap untuk pasien disabilitas, lansi, ibu hamil dan ibu melahirkan akan menimbulkan kesenjangan dilihat dari aspek berikut : Akses : Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana Manfaat : Meningkatkan mutu pelayanan terutama keselamatan pasien di ruang rawat inap.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>c. Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung</p> <p>d. Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien disabilitas, lansi, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan</p> <p>e. Penyebab Eksternal</p> <p>f. Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung berbasis gender</p> <p>g. Masyarakat belum memahami konsep gender</p>	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	
	<table> <tr> <td>Tujuan</td><td>pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap</td></tr> </table>	Tujuan
Tujuan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap	

		Alokasi Anggaran	Rp.125.000.000,-
	Komponen/ aktifitas 2		
		Tujuan	
		Alokasi Anggaran	
	Total anggaran		Rp. 125.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM	<p>Output :</p> <p>Terlaksananya pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi, Rawat Inap Syaraf dan Rawat Inap VIP</p> <p>Outcome :</p> <p>Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh</p>		


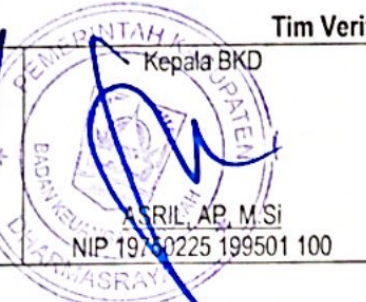

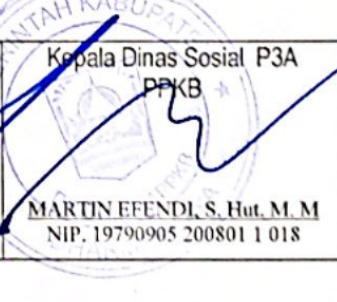
Punjung, 20 Juni 2024

Direktur RSUD Sungai Dareh

Sarti Novita, S Si, APT M. KM

NIP.1977/117 200501 2 008

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bapperida	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
			
Drs. Andy Sumanto, CFA NIP.19681220.199009 1 001	ASRIL, AP, M.Si NIP.19780225 199501 100	Maryanto, S.Sos.M.T NIP.19690609 198902 1 001	MARTIN EFENDI, S.Hut. M.M NIP. 19790905 200801 1 018

FORM KAKI/ TOR

Program		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
Sasaran Program		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terintegrasi
Kegiatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Operasional Pelayanan Rumah Sakit
LatarBelakang	DasarHukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.
	GambaranUmum	Subkegiatan operasional pelayanan rumah sakit dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Gedung RS dilaksanakan setiap tahunnya.
Kegiatan	UraianKegiatan	pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap
	IndikatorKinerja	Meningkatnya keselamatan pasien lansia, Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di RSUD Sungai Dareh
	BatasanKegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien di RSUD Sungai Dareh.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Membuat perencanaan kegiatan dan pemasangan Closed duduk dan pegangan tangan di toilet pasien rawat inap : Rawat Inap Bedah, Rawat Inap Penyakit Dalam, Rawat Inap Perinatologi, Rawat Inap Anak, Rawat Inap Kebidanan, Rawat Inap Paru, Rawat Inap HCU, Rawat Inap Isolasi dan Rawat Inap VIP
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		RSUD Sungai Dareh.
Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan		Pelaksana : PPTK pekerjaan pemeliharaan rutin rumah sakit. Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sungai Dareh
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 125.000.0000,-



Pujung, 20 Juni 2024
Direktur RSUD Sungai Dareh

Sarti Novita, S Si, APT M. KM
NIP. 19771117 200501 2 008

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025

Urusan :		
Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Sub Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Program	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	1.02.02.2.02.32	Operasional pelayanan rumah sakit
Sumber Pendanaan		BLUD
Lokasi Kegiatan		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh
Waktu Pelaksanaan		Januari s/d Desember 2025
Kelompok Sasaran		
Jumlah 2022		Rp. 125.000.0000,-
Jumlah 2023		
Jumlah 2024		
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program Masukan Keluaran Hasil		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Hitungan
		Koefisien Satuan Harga PPN Jumlah

Ponjung, 20 Juni 2024
Direktur RSUD Sungai Dareh



Sarti Novita, S Si, APT M. KM
19771117 200501 2 008

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE PROGRAM	1.05.02		
KEGIATAN	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <p>a) Dalam Operasi penertiban Penegakan Peraturan Daerah, pada umumnya yang terjaring adalah perempuan</p> <p>b) Pedagang kakilima mayoritas perempuan</p> <p>c) Adanya laporan masyarakat tentang wanita penghibur yang ada di cafe-cafe dan tempat hiburan malam.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses : Kegiatan Operasi penegakan Perda dan Perkada yang belum maksimal</p> <p>Partisipasi:</p> <p>Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Kontrol:</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat.</p> <p>Manfaat :</p> <p>Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang Perda dan Perkada</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <p>a) Kurangnya Sosialisasi tentang Perda dan Perkada</p> <p>b) Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <p>a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Penegakan Perda dan Perkada</p> <p>b) Masih kurangnya Sosialisasi tentang Peraturan Daerah</p> <p>c) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan Daerah</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan Sosialisasi Perda dan Perkada di 11 Kecamatan	
		Tujuan	Perempuan lebih memahami tentang Perda dan Perkada
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 2	Meningkatkan Jumlah Operasi Penegakan Perda dan Perkada	
		Tujuan	Memberikan efek jera kepada terhadap pelangar Perda dan Perkada
		Alokasi Anggaran	Rp. 87.000.000,-
	Total Anggaran	Rp.87.000.000,-	


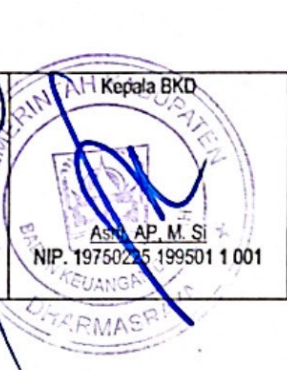

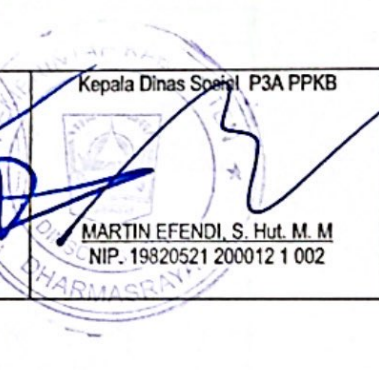
Capaian Program	Out put Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Out come Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
-----------------	--

Pulau Punjung, Juni 2024

PIL. KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,


(YUNISMAN, S.Sos.)
NIP. 19680613 199303 1 004

Tim Verifikasi

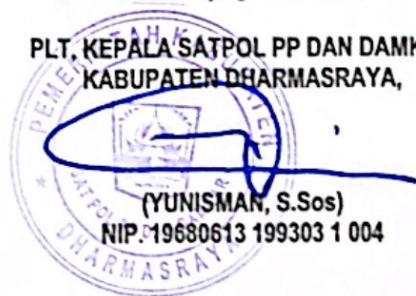
 Inspektur Drs. Andi Sumanto, CHA NIP. 19681221 199004 1 001	 Kepala BKD Asri AP. M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos. M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sport P3A PPKB MARTIN EFENDI, S. Hut. M. M NIP. 19820521 200012 1 002
---	--	--	--

FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sub Kegiatan		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Gambaran Umum	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peratuan Kepala Daerah
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Sosialisasi Perda dan Perkada di 11 Kecamatan
	Indikator Kinerja	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peratuan Kepala Daerah di 11 Kecamatan
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Masyarakat
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		11 Kecamatan
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanggung Jawab : Kepala Satpol PP dan Damkar
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 87.000.000,-

Pulau Punjung, Juni 2024

**PLT, KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,**



(YUNISMAN, S.Sos)

NIP. 19680613 199303 1 004

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

TAHUN ANGGARAN : 2025



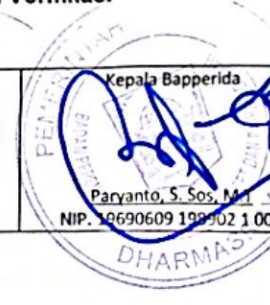

PROGRAM	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE PROGRAM	1.05.02		
KEGIATAN	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran		
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Dalam Operasi penertiban Pelajar, yang terjaring kebanyakan siswa laki-laki dibanding perempuan. Siswa yang terjaring kedapatan merokok Adanya laporan masyarakat tentang siswa yang Berkeliaran pada jam pelajaran diindikasikan menggunakan / menghisap lem.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses : Masih kurangnya manfaat Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP pelajar laki-laki dibandingkan dengan pelajar perempuan.</p> <p>Partisipasi: Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat tentang penyakit dalam menjaga Ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Kontrol: Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat.</p> <p>Manfaat : Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang bahaya penyakit masyarakat</p> <p>b. Penyebab Internal a) Jumlah Patroli rutin Saatpol PP yang masih belum mencapai target SPM b) Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengarusutamaan Gender</p> <p>c. Penyebab Eksternal a) Masih rendahnya alokasi dana terhadap kegiatan Patroli Satpol PP b) Masih kurangnya Pengawasan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah</p>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki	
		Tujuan	Agar pelajar laki-laki tidak berkeliaran pada jam pelajaran
		Alokasi	
		Anggaran	

	Komponen/ Aktifitas 2	Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp	
		Tujuan	Memberikan efek jera kepada pelajar yang berkeliaran pada jam pelajaran
		Alokasi Anggaran	Rp. 253.000.000,-
	Total Anggaran	Rp. 253.000.000,-	
Capaian Program	Out put Terlaksananya Patroli Rutin Satpol PP terutama pada Pelajar yang tidak masuk pada jam pelajaran Out come Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		

Pulau Punjung, Juni 2024
Pit, KEPALA SATPOL PP DAN
DAMKAR
KABUPATEN DHARMASRAYA,


(YUNISMAN, S.Sos)
NIP. 19680613 199303 1 004

Tim Verifikasi

 Inspektur Drs. Andy Samanto, CfrA NIP. 19591221 199009 1 001	 Kepala BKD Ariil, AP, M. Si NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bapperida Paryanto, S. Sos, M. I NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial P3A PPKB MARTIN EFFENDI, S.Hut, M.M NIP. 19790905 200801 1 018
---	---	--	---

FORM KAK/ TOR

Program		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sasaran Program		Terlaksananya Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Latar Belakang	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Gambaran Umum	Patroli Rutin dan Pengamanan Kegiatan Daerah dan Masyarakat
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Patroli Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Indikator Kinerja	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Batasan Kegiatan	-
Maksud dan Tujuan		Melakukan Patroli pada tempat-tempat yang diindikasikan adanya Gangguan Trantibum
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Patroli, Sosialisasi dan Pengamanan
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Wilayah Kabupaten Dharmasraya
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan		Pelaksana : PPTK Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Penanggung Jawab : Kepala Satpol PP dan Damkar
Jadwal		Bulan Januari s/d Desember 2025
Biaya		Rp. 253.000.000,-

Pulau Punjung, Juni 2024
 PIt, KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
 KABUPATEN DHARMASRAYA,



FORMAT GBS (2)

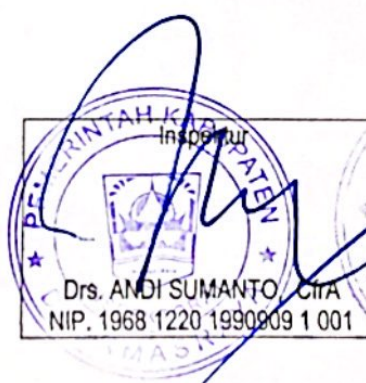
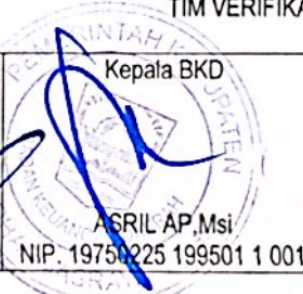
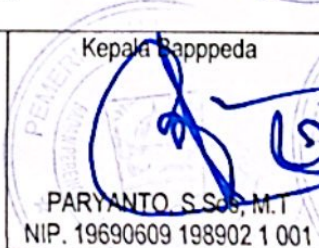
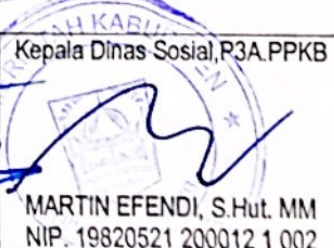
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat (service delivery)

SKPD	: KECAMATAN SUNGAI RUMBAI		
TAHUN ANGGARAN	: 2025		
PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
KODE PROGRAM	7.01.02		
KEGIATAN	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
HASIL/OUTPUT	(Diambil dari GAP langkah 6)		
ANALISIS SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Jumlah layanan Paten Tahun 2023 Non Disabilitas 1.147 orang, Yang Disabilitas tidak ada c. Jumlah Data Disabilitas diKecamatan Sungai Rumbai sebanyak 15 Orang 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender <ol style="list-style-type: none"> a. Minimnya warga penyandang Disabilitas mengurus kelengkapan biodata warganegara b. Pelayanan khusus untuk disabilitas belum diperhatikan secara khusus c. Disiapkan jalur khusus untuk pelayanan disabilitas d. Disiapkan loket khusus disabilitas 		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Menyediakan Jalur Khusus dan kursi roda untuk penyandang disabilitas	
	Alokasi Anggaran	Rp. 75.000.000,-	
	Komponen/ aktifitas 2	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat dan penyandang disabilitas	
	Alokasi Anggaran	Rp.3.500.000,-	
	Komponen/ aktifitas 3	(Diambil dari GAP langkah 7)	
	Tujuan	Meningkatkan Koordinasi dengan lintas sector	
	Alokasi Anggaran	Rp. 1.500.000,-	
	Total anggaran	Rp. 80.000.000,-	
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Terciptanya Layanan PATEN Kecamatan yang responsif gender		

Sungai Rumbai, 28 Juni 2024
Camat Sungai Rumbai

ARWINTA
NIP. 19670919 198803 1 004

TIM VERIFIKASI

 Inspektur Drs. ANDI SUMANTO, CTA NIP. 1968 1220 199009 1 001	 Kepala BKD AGRIL AP, Msi NIP. 19750225 199501 1 001	 Kepala Bappeda PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB MARTIN EFENDI, S.Hut. MM NIP. 19820521 200012 1 002
---	--	--	---